

**PENGAWASAN BANK INDONESIA PEKANBARU TERHADAP
KEGIATAN USAHA PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH
CABANG UTAMA PEKANBARU**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
dalam Mencapai Gelar Sarjana Program
Strata Satu (S1) Ekonomi Islam
(S.Ei)



Oleh:

**ELISA
10725000324**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU RIAU
1432 H/2011 M**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: **PENGAWASAN BANK INDONESIA PEKANBARU TERHADAP KEGIATAN USAHA PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH CABANG UTAMA PEKANBARU**

Yang melatarbelakangi masalah ini adalah tentang pandangan IMF (*International Monetary Funds*) pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa pengawasan Bank Indonesia saat itu lemah dengan alasan bahwa banyaknya bank-bank yang berdiri saat itu, halnya membuktikan bahwa bagaimana bisa efektif suatu pengawasan apabila banyaknya lembaga yang diawasi dan terbatasnya lembaga yang mengawasi. Pandangan tersebut terdengar lagi dengan rentannya pembobolan yang terjadi saat sekarang ini yang menyatakan bahwa pengawasan Bank Indonesia masih lemah.

Penelitian ini penulis lakukan pada Kantor Bank Indonesia Pekanbaru (KBI) yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No 464. telp. (0761) 32000 fax (0761) 31046. Dan bank riau kepri syariah yang beralamt Jl. Sudirman No. 377 pekanbaru 28116 telp (0761) 37050, fax. 21195. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan Bank Indonesia pekanbaru terhadap kegiatan usaha PT. Bank Riau Kepri Syariah yang merupakan bank syariah satu-satunya bank syariah yang diawasi oleh Bank Indonesia Pekanbaru.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara (*interview*), dokumentasi (arsip) dan kajian pustaka. Dalam teknik penulisan penelitian ini adalah *Deduktif*, *Induktif* dan *Deskriptif* terhadap data primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pegawai Bank Indonesia bagian pengawasan yang berjumlah 8 orang dan juga divisi Bank Riau Kepri Syariah yang berjumlah 1 orang, karena populasi dalam penelitian ini dapat terjangkau maka penulis menggunakan teknik total sampling yaitu mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan yaitu pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia Pekanbaru dikatakan sudah efektif, karena sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan Bank Indonesia sendiri. meskipun masih ada beberapa mekanisme yang masih kurang sesuai dengan ketentuan yaitu tentang pengawasan secara *On Site* yang mana seharusnya dilakukan minimal 1 tahun sekali tetapi pada kenyataannya bank indoensia sampai sekarang ini baru 2 kali melakukan pengawasan secara langsung. karena banyaknya bank yang harus diawasi oleh Bank Indonesia, dan Bank Riau Kepri Syariah saat ini dalam keadaan sehat dari laporan keuangan yang dikirim menyatakan bahwa Bank Riau Kepri Syariah kepada Bank Indonesia dan bank riau kepri syariah saat ini juga dalam pengawasan normal dan tidak perlu dikhawatirkan. Selain itu Bank Indonesia juga telah berkoodinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Riau Kepri Syariah untuk lebih mengamati kegiatan usaha Bank Riau Kepri Syariah yang merupakan bank pembangunan daerah Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Metode Penelitian.....	11
E. Metode Penulisan	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II PROFIL BANK INDONESIA PEKANBARU DAN PROFIL PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH CABANG UTAMA PEKANBARU	
A. Profil Bank Indonesia Pekanbaru.....	16
B. Profil PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Utama Pekanbaru	29
BAB III RUANG LINGKUP TENTANG PENGAWASAN BANK INDONESIA	
A. Aspek-aspek Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah.....	35
B. Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia	46
C. Metode Pengawasan Bank	49
D. Tujuan Pengawasan Bank Indonesia.....	50
E. Fungsi Pengawasan Dalam Islam.....	50
BAB IV PENGAWASAN BANK INDONESIA PEKANBARU TERHADAP PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH	
A. Kegiatan Usaha PT. Bank Riau Kepri Syariah	53
B. Pelaksanaan Pengawasan Bank Indonesia Terhadap PT. Bank Riau Kepri.....	59
C. Analisis Tentang Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Kegiatan Usaha PT. Bank Riau Kepri Syariah Menurut Teori Pengawasan Bank.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi. Yang mana fungsinya sebagai pengumpul dan menyalurkan dana, yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.¹ Sedangkan lembaga yang diakui secara sah di Indonesia ada tiga jenis yaitu Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi.

Perbankan sekarang ini bukanlah sesuatu yang asing bahkan, pada masa sekarang ini Masyarakat kita terutama yang hidup di perkotaan sudah sering menggunakan jasa perbankan. Dan sebagian besar masyarakat pedesaan pun sudah terbiasa mendengar kata bank, hanya saja perlu diingat bahwa pengenalan bank dari sebagian masyarakat ini, baru sebatas dalam artian sempit. Masyarakat mengenal bank masih sebatas yang ada kaitannya dengan tabungan atau kredit, selebihnya banyak kurang tahu, padahal begitu banyak layanan bank yang dapat dinikmati oleh masyarakat saat ini.² Begitu juga halnya dengan masyarakat muslim yang ada di pedesaan, mereka cenderung kurang mengetahui tentang perbedaan antara bank mana yang sesuai dengan Syari'ah Islam dan bank mana yang tidak sesuai dengan Syari'ah Islam.

¹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Asuransi di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005) cet. Ke 2. hal.53

2. Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002) hal. V

Pengetahuan bagi masyarakat muslim yang paling mendasar terhadap perbedaan bank konvensional dengan bank Syari'ah adalah bunga dan bagi hasil. Padahal masih banyak perbedaan dari kedua perbankan tersebut, salah satunya adanya dewan pengawas syari'ah yang berfungsi mengawasi jalannya operasional sehari-hari lembaga keuangan syari'ah agar selalu sesuai dengan ketentuan syari'ah.³

Selain itu, ada pandangan yang berasal dari para pemikiran barat, yang beranggapan seolah-olah Islam merupakan Agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual, bukan sebagai suatu yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan yang sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian⁴ lembaga yang berperan dalam bidang keuangan saat ini.

Dalam ajaran Islam dikenal adanya doktrin tentang riba dan pengharamannya. Islam tidak mengenal sistem perbankan modern dalam artian praktik, sehingga terjadinya perbedaan pendapat dalam hal boleh tidaknya dan halal haramnya.⁵ Dalam ajaran Islam hubungan satu sama lain jangan dijadikan pembelengguan yang hanya dipakai untuk memperkaya orang yang sudah kaya saja.⁶

³ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta : PT. Alex Media Komputindo, 2006), hal. 229-230

⁴ . Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 3

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), cet. ke-2 hal.183-191

⁶ Buchari Alam, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2003) cet. ke-3 hal. 281

Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwa kepada Allah agar kamu beruntung"* (QS. Ali-Imran: 130)

Dan dijelaskan lagi dengan hadits Rasulullah SAW.

ن ابن مسعود قال ان النبي صل الله عليه وسلم لعن اكل الربا ومؤكله وشاهديه وكتابه
اذا علموا ذلك ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ويوم القيا مة ()

Artinya: *"Dari Ibnu Mas'ud berkata: "Sesungguhnya Nabi SAW, telah melaknat pemakan riba (orang yang memberi pinjaman), pemberi makannya (orang yang meminjam), dan dua orang saksi dan penulisnya. Jika mereka tahu demikian, maka mereka dilaknat dengan lidah Nabi Muhammad pada hari kiamat," (HR. An-Nasai).*

Sejak tahun 1970-an, di berbagai negara telah berusaha mendirikan bank-bank Syari'ah, adapun tujuan dari pendirian itu pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Syari'ah Islam serta tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.⁷

Secara umum perbankan syari'ah adalah suatu lembaga intermediasi atau lembaga penghubung antara pemilik modal atau dana yang membutuhkan peluang untuk berinvestasi dengan pemilik usaha yang membutuhkan

⁷ Mezra Gamal, *Aktivis Ekonomi Syari'ah Catatan Dakwah Seorang Praktisi Perbankan Syari'ah*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004) hal. 5

tambahan modal. Bank Syari'ah lebih mendekatkan nasabah pemilik dana dengan nasabah pemilik usaha, bukan malah menjadi penghalang antara mereka agar bisa mencari keuntungan dari kedua belah pihak tersebut.⁸

Bank Syari'ah sendiri lahir sebagai salah satu alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian kemudahan umat Islam khususnya di Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban yaitu dengan perbankan syari'ah.⁹ Namun walaupun demikian perbankan syari'ah masih mempunyai tantangan untuk masa yang akan datang yaitu mampukah sebagai pusat intermediasi, mampukah berkembang dengan subur dan sebagai *Rahmatan Lil Al-Alamin*.¹⁰

Di Provinsi Riau dari tahun ke tahun jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil syari'ah terus bertambah. Sampai dengan triwulan IV 2010, tercatat 11 bank yang terdiri dari 9 Bank Umum dan 2 Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.¹¹

Perkembangan perbankan Syari'ah tidak luput dari kerjasama dari berbagai pihak serta pengawasan Bank Indonesia yang mendorong bertumbuhnya perbankan syari'ah nasional dalam tahun-tahun mendatang.¹² Diantaranya pemerintah, Bank Indonesia, lembaga pendidikan, pemikir-pemikir ekonomi Islam kontemporer serta masyarakat muslim umumnya.

⁸ HB. Taman Ali, Mokh. Syaiful Bakhir dkk, *Ekonomi Syari'ah dalam Sorotan* (Jakarta Yayasan Amanah , 2003) Cet. ke 1 hal. 87

⁹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2004), Cet. ke 2 hal. 1

¹⁰ Iman Hilman, *Perbankan Syariah Masa Depan*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), hal 4-5

¹¹ Bank Indonesia *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Riau* (9 Februari 2011) hal. 6

¹² M. Luthfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003) cet 1 hal. 17

Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan operasional, kegiatan usaha maupun rencana, karena dengan demikian, bank syariah maupun bank konvensional tidak akan lewat dari batasan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia salah satunya sebagai *bank to bank* yaitu mengatur, mengkoordinir, mengawasi serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan.¹³

Dalam dunia perbankan pasti ada yang menjadi induk bank (pedoman) yaitu merupakan bank central dari bank-bank yang ada. Dan di Indonesia bank central dari bank-bank yaitu Bank Indonesia. Yang mana setiap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan uang contohnya dalam hal menstabilkan Rupiah maupun lembaga perbankan, keduanya saling berhubungan. semua kegiatan ini harus diketahui Bank Indonesia baik dalam hal pendirian, penutupan atau mengeluarkan produk serta dalam hal tentang kebijakan, dan yang lebih penting tentang pengawasan, semuanya akan diatur oleh Bank Indonesia.¹⁴

Bank Indonesia tahun 2002 dinyatakan oleh IMF bahwa pada bagian pengawasan belum berfungsi secara optimal dilakukan oleh pihak Bank Indonesia (BI), melihat banyaknya bank yang ada di Indonesia sangat besar jumlahnya. Logikanya bagaimana mungkin pelaksanaan pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif kalau jumlah bank yang harus diawasi lebih

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 168

¹⁴ . Veithzal Rivai, dkk. *Bank and Financial Institution Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 114

banyak dari jumlah lembaga yang mengawasi.¹⁵ Sama halnya dengan saat sekarang ini Bank Indonesia secara umum masih dianggap lemah dalam hal pengawasan terhadap perbankan di Indonesia, yang mana banyak terjadi kasus dalam perbankan yang juga menyangkut tentang pengawasan Bank Indonesia di antaranya kasus pembobolan uang yang dilakukan oleh pihak luar maupun pihak dalam seperti kasus Bank Century, kasus bank CIMB NIAGA yaitu tentang pemindahan dana nasabah rekening direktur bank tersebut. Dan masih banyak lagi kasus perbankan yang terjadi dan hal tersebut memojokkan Bank Indonesia selaku bank yang mengawasi seluruh bank.

Kantor Bank Indonesia terdapat di semua provinsi. Dan salah satunya berada di Provinsi Riau tepatnya di Kota Pekanbaru karena merupakan ibukota dari Provinsi Riau. Secara tidak langsung Kantor Bank Indonesia Pekanbaru (KBI) Pekanbaru selanjutnya mempunyai tugas dan wewenang terhadap pertumbuhan dan kelangsungan perbankan yang ada di Riau. Dari beberapa tugas Bank Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Perbankan salah satunya adalah tentang pengawasan suatu bank baik bank syari'ah maupun bank konvensional, yang mana itu merupakan tugas dan wewenang KBI Pekanbaru. Dan yang paling penting KBI Pekanbaru hanya mengawasi satu bank yaitu PT. Bank Riau Kepri serta unit usaha syari'ahnya yaitu PT. Bank Riau Kepri Syari'ah.

Dari semua bank yang ada di Riau umumnya dan di Pekanbaru khususnya harus dapat izin dari KBI setempat, dalam hal pendirian. kecuali

¹⁵ Krisna Wijaya, *Analisis Krisis Perbankan Nasional*, (Jakarta: Kompas, 2000) hal. 151

bank yang kantor pusatnya ada di Riau segala sesuatu diurus oleh KBI Pekanbaru, dan perbankan yang ada di Pekanbaru hanya kantor cabang dan kantor cabang pembantu kecuali PT. Bank Riau Kepri dari kantor pusat sampai kantor kasnya ada di Riau. Hanya saja Bank Riau bukan bank umum syari'ah tetapi mempunyai kantor cabang syari'ah dan unit usaha syari'ah.

Menurut salah satu pegawai Bank Indonesia Pekanbaru bagian pengawasan mengatakan bahwa "karena bank-bank yang ada di Riau bukan kantor bank syari'ah pusat, maka segala sesuatunya diatur oleh Direktorat Perbankan Syari'ah yang berada di Jakarta, sedangkan Kantor Bank Indonesia Pekanbaru hanya merekomendasikan apabila ada pembukaan kantor cabang syari'ah di Provinsi Riau, tetapi apabila pembukaan kantor cabang pembantu syari'ah dan serta unit usaha syari'ah PT. Bank Riau Kepri akan di proses di Kantor Bank Indonesia Pekanbaru sampai dengan kegiatan usaha bank tersebut".¹⁶ Dan pada saat sekarang ini banyak bank umum konvensional yang membuka unit usaha syari'ah, dan saat ini banyak bank konvensional yang ingin pembukaan unit usaha syari'ah. Apakah mereka ingin mencari keuntungan semata atau memang dengan kesadaran untuk mendirikan bank yang berbasis syari'ah atau ada hal lainnya. Sedang kita ketahui bahwa bank konvensional dan bank syari'ah sudah punya pangsa pasar masing-masing. Dan apabila bank umum konvensional membuka unit usaha syari'ah berarti bank konvensional akan mendapatkan keuntungan ganda yaitu bank yang menjalankan prinsip konvensional dan bank yang menjalankan berprinsip

¹⁶Yunita. Wawancara (Bank Indonesia Pekanbaru, 8 Maret 2011)

Syari'ah. Hal ini juga merupakan hal penting yang harus diawasi oleh Bank Indonesia contohnya tentang tenaga kerja (sumber daya manusia) yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan jasa bank syari'ah.¹⁷

Bentuk-bentuk perbankan syari'ah yang ada di Pekanbaru diantaranya: Bank umum syari'ah sedangkan yang ada di Pekanbaru hanya kantor cabang dan kantor cabang pembantu sedangkan kantor pusatnya berada di Jakarta, seperti PT Bank Syari'ah Mandiri, PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., PT Bank Syari'ah Mega Indonesia, PT. Bank BRI Syari'ah, PT. Bank BNI Syari'ah semua ini merupakan kantor cabang dari bank umum syari'ah. Sedangkan bank dalam bentuk unit usaha syari'ahnya yaitu: PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT. Bank Permata Tbk, PT. Bank CIMB NIAGA Tbk, dan hanya kantor cabang saja yang ada di Riau. Dan yang ada di Pekanbaru yaitu hanya UUS PT Bank Riau Kepri Syari'ah. dan ada juga Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) yaitu : PT BPRS Berkah Dana Fadilah dan PT. BPRS Hasanah. Dan Bank Indonesia Pekanbaru hanya mengawasi tentang pendiriannya saja. Kecuali bank yang kantor induknya berada di Pekanbaru maka pengawasannya secara keseluruhan, seperti UUS PT. Bank Riau Kepri Syari'ah.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan, baik bank syari'ah maupun bank konvensional telah diatur oleh Undang-Undang Seperti pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah pada BAB VIII tentang pembinaan dan pengawasan pasal 50 sampai pasal 54.

¹⁷ Peraturan Bank Indonesia , Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.

Pasal 50 yang berbunyi:

Pembinaan dan pengawasan bank syari'ah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia

Pasal 51 yang berbunyi:

1. Bank Syari'ah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas kualitas manajemen dan seterusnya.
2. Kreteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syari'ah dan UUS sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh peraturan Bank Indonesia dan seterusnya, sampai pasal 54

Tahun 2002 Bank Indonesia dinyatakan oleh International Monetary Funds (IMF) bahwa pengawasan BI belum berfungsi secara optima, melihat banyaknya bank yang ada di Indonesia sangat besar jumlahnya. Logikanya bagaimana mungkin pelaksanaan pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif kalau jumlah bank yang harus diawasi lebih banyak dari jumlah lembaga yang mengawasi.¹⁸

Disusul dengan kasus Rentetan pembobolan pada saat sekarang ini, setidaknya membuktikan bahwa SDM, sistem manajemen informasi dan teknologi, serta pengawasan di internal bank tersebut patut dipertanyakan. Pada akhirnya hal itu menunjukkan bahwa betapa lemahnya pengawasan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang salah satu tugasnya mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia.

¹⁸ Krisna wijaya, Analisis Krisis Perbankan Nasional, (jakarta: Kompas, 2000) hal. 151

Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti sebuah karya ilmiah yang berjudul: **“PENGAWASAN BANK INDONESIA PEKANBARU TERHADAP KEGIATAN USAHA PT. BANK RIAU KEPRI SYARI’AH”**

B. Batasan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini hanya difokuskan tentang pengawasan Bank Indonesia terhadap kegiatan usaha PT. Bank Riau Kepri Syari’ah, yaitu tentang aspek administratif, aspek keuangan dan aspek *compliance*. Segala bentuk kasus yang sama ditempat lain bukan bahasan dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat mengambil beberapa masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja ruang lingkup pengawasan Bank Indonesia terhadap Bank Syari’ah?
2. Bagaimana kegiatan usaha PT. Bank Riau Kepri Syari’ah?
3. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Bank Indonesia terhadap kegiatan usaha PT, Bank Riau Kepri Syari’ah?

D. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui ruang lingkup pengawasan Bank Indonesia terhadap Bank Syari'ah.
 - b. Untuk mengetahui kegiatan usaha PT. Bank Riau Kepri Syari'ah
 - c. Untuk mengetahui pengawasan Bank Indonesia terhadap kegiatan usaha PT Bank Riau Kepri Syari'ah.
2. Kegunaan penelitian
- a. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat.
 - b. Sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis, terutama dalam bidang perbankan.
 - c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S-1) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum jurusan Ekonomi Islam pada Universitas Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di kantor Bank Indonesia Cabang Pekanbaru Jl. Soedirman No. 464. Telp (0761) 32000 Fax (0761) 31046, dan PT. Bank Riau Kepri Syariah cabang utama Pekanbaru beralamat Jl. Jend. Sudirman No.377 pekanbaru 28116 telp. (0761) 37050 fax 21195

Alasan penulis mengambil lokasi penelitian pada Bank Indonesia Pekanbaru adalah karena Bank Indonesia Pekanbaru merupakan bank

central setempat yang mengawasi jalannya kegiatan bank konvensional maupun bank syariah serta pengawasan terhadap kegiatan usaha PT Bank Riau Kepri Syariah.

2. Subjek Dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pegawai Bank Indonesia (BI) Pekanbaru pada bagian pembinaan dan pengawasan, dan yang menjadi objeknya adalah pelaksanaan pengawasan Bank Indonesia terhadap kegiatan usaha PT. Bank Riau Kepri Syariah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Bank Indonesia pada bagian pengawasan yang berjumlah 8 orang dan divisi Bank Riau Kepri Syariah yang berjumlah 1 orang. Karena populasi dalam penelitian ini terjangkau maka penulis menggunakan total sampling yaitu mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel

4. Metode Pengumpulan data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara: Yaitu Peneliti melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau responden, guna melengkapi data yang diperlukan tentang pengawasan Bank Indonesia terhadap pendirian bank syariah di Riau seperti pegawai Bank Indonesia bagian pengawasan.

- b. Dokumentasi: Yaitu dalam penelitian ini peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan penulis pada kantor Bank Indonesia Pekanbaru.
- c. Kajian Pustaka: yaitu peneliti mengumpulkan data dari referensi yang ada.

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis peroleh adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu diperoleh langsung dari Kantor Bank Indonesia Pekanbaru.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen yang berkenaan dengan masalah, literatur dan arsip serta buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan.

6. Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah sesuai dengan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu cara yang menjelaskan hasil-hasil penelitian yang ada dan mengkaitkan dengan teori-teori yang ada hubungannya dengan penelitian.

7. Metode penulisan

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu menggambar kaedah khusus yang ada kaitannya dengan menimbulkan fakta-fakta secara khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan, subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini. Penulis akan memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan pendahuluan yang mengandung latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : PROFIL BANK INDONESIA DAN PROFIL PT. BANK RIAU KEPRI SYARI'AH

Memaparkan gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri pendirian Bank Indonesia Pekanbaru, sejarah berdirinya Bank Indonesia Pekanbaru, landasan hukum Bank Indonesia, fungsi, program, serta visi dan misi Bank Indonesia Pekanbaru. Sejarah pendirian UUS Bank Riau Kepri Syari'ah, landasan hukum, tugas dan wewenang, visi dan misi, struktur organisasi, dan lain-lain.

BAB III : RUANG LINGKUP PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP BANK SYARI'AH

Aspek-aspek pengawasan Bank Indonesia terhadap bank syari'ah, Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembinaan Bank Indonesia, Metode Pengawasan Bank, Tujuan Pengawasan Bank Indonesia, fungsi pengawasan dalam islam

BAB IV : PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP PT. BANK RIAU KEPRI SYARI'AH

Memaparkan hasil penelitian mengenai ruang lingkup pengawasan Bank Indonesia terhadap bank syari'ah, mengenai kegiatan usaha PT. Bank Riau Keperi Syari'ah, dan pelaksanaan pengawasan Bank Indonesia Pekanbaru terhadap PT. Bank Riau Kepri Syari'ah menurut teori pengawasan bank syari'ah.

BAB V : KESIMPULAN

Berupa kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

PROFIL BANK INDONESIA DAN PROFIL PT. BANK RIAU KEPRI SYARI'AH CABANG UTAMA PEKANBARU

A. Profil Bank Indonesia

1. Sejarah Bank Indonesia

Sebelum merdeka, Indonesia tidak memiliki bank sentral. Pada saat itu tugas bank central hanya terbatas pada bank sirkulasi yang dilakukan oleh *De javasche bank NV* yang diberi hak *oktoroi* (1827) yaitu hak mencetak dan mengedarkan uang *golden belanda* oleh pemerintah belanda.¹ Selanjutnya setelah proklamasi tepatnya pada tanggal 1945 dalam sidang dewan menteri pemerintah Indonesia memutuskan untuk mendirikan satu bank sirkulasi berbentuk Bank Milik Negara dan langkah pertama dibentuk yayasan dengan nama “Pusat Bank Indonesia” yayasan ini sebagai cikal bakal berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI).

Ketika konferensi meja Bundar (KMB) tahun 1949 di *Den Haag*, salah satu keputusan pentingnya adalah penyerahan kedaulatan Indonesia kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Berkaitan dengan masalah perbankan, pada saat tersebut utusan pemerintah mengalami kesulitan untuk mengusahakan agar bank Negara Indonesia yang telah didirikan sejak tahun 1946 ditetapkan *De Javasche Bank* sebagai bank sentral.

¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke 1, hal. 205

Selanjutnya tanggal 6 Desember 1951 dikeluarkan UU Nasionalisasi *De Javasche Bank* dan selanjutnya tanggal 1 juli 1953 dikeluarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia sebagai pengganti *De Jasache Bank Wet* tahun 1922. mulai saat itu lahirlah satu bank sentral di Indonesia yang beri nama Bank Indonesia.² Keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia hingga tahun 1968, tugas pokok Bank Indonesia selain menjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang, dan mengembangkan sistem perbankan, juga melaksanakan beberapa fungsi sebagaimana dilakukan oleh bank komersial. Yaitu menentukan kebijakan moneter yang berada ditangan pemerintah melalui pembentukan dewan moneter yang tugasnya menentukan kebijakan moneter yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia. Dewan moneter juga bertugas memberikan petunjuk kepada direksi Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai mata uang dan memajukan perkembangan perkreditan dan perbankan. Semua itu mencerminkan bahwa kedudukan Bank Indonesia pada periode tersebut masih merupakan bagian dari pemerintah.

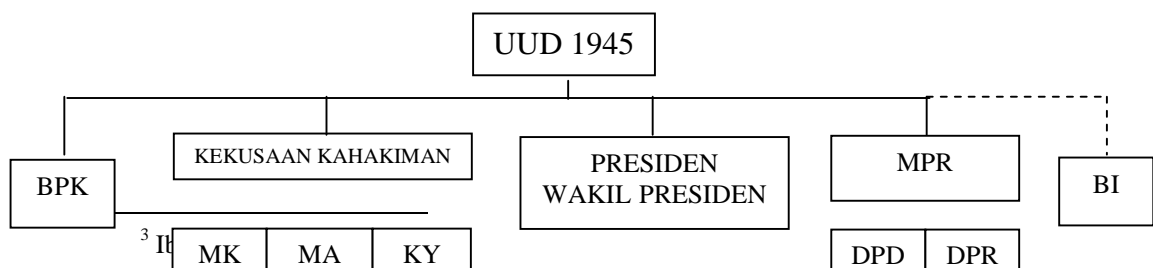
Pada tahun 1968 dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 13 tahun 1968 Bank Indonesia tidak lagi berfungsi ganda kerana beberapa fungsi sebagai bank komersial dihapuskan. Akan tetapi misi Bank Indonesia sebagai agen pembangun masih melekat, dan juga tugas sebagai kasir pemerintah dan *banker's bank*. Selanjutnya dengan dikeluarkannya

² Veithzal Rivai, *dkk op cit* hal. 36

UU No. 23 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-undang No.13 Tahun 1968, yang nama berisikan tentang kedudukan Bank Indonesia selaku bank sentral Republic Indonesia telah dipertegas kembali. Yaitu Bank Indonesia mempunyai kedudukan yang independen seperti bank-bank di beberapa Negara, seperti Amerika Serikat, Cili, Filipina, Inggris dan yang lainnya.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 1999, Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum. Dengan status tersebut, Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum termasuk mengelola kekayaannya sendiri terlepas dari anggaran dan belanja Negara (APBD). Bank indoensia selaku lembaga Negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi Negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA) karena Bank Indonesia berada diluar pemerintah, meskipun Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga Negara yang independen, tetapi dalam melaksanakan tugasnya Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, pemerintah dan pihak lainnya.³ Yang mana dapat dilihat stukturanya sebagai berikut:

Gambar.I Struktur Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia



Dengan gambar struktur tersebut kita dapat melihat bahwa Bank Indonesia bukanlah bagian dari pemerintah dan bukan juga termasuk anggota pemerintahan, karena dari mulai Bank Indonesia berdiri sudah mempunyai ide untuk mewujudkan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mandiri dan independen. Mantan Gubernur Bank Indonesia Soedradjad Djiwandono misalnya seringkali menyatakan penadapat untuk menjadikan Bank Indonesia mempunyai wewenang yang jelas dan tegas. Sama halnya dengan Rachmat Saleh dan Adrianus Mooy juga pernah menyatakan bahwa Bank Indonesia di masa depan harus melepaskan diri dari tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah.⁴

2. Tujuan dan Tugas Utama Bank Indonesia

Adapun tujuan Bank Indonesia seperti telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 BAB III pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan Rupiah. Mata uang Rupiah perlu dijaga dan dipelihara mengingat dampak yang ditimbulkan apabila suatu mata uang tidak stabil salah satunya terjadi inflasi yang sangat memberatkan masyarakat luas. Kestabilan Rupiah yang dimaksud adalah:

- 1) Kestabilan nilai Rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi.

⁴ Didik rachbini, Dkk, *Bank Indonesia Menuju Independens I Bank Sentral*, (jakarta: PT. mardi mulyo, 2000) cet 1, hal 163-164

- 2) Kestabilan nilai Rupiah terhadap mata uang Negara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang nagara lain.⁵

Penetapan tujuan di atas menjadi sasaran dan batas tanggung jawab Bank Indonesia semakin jelas dan terfokus. Yaitu kestabilan nilai Rupiah.

3. Tugas Bank Indonesia

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka tugas Bank Indonesia yang harus dilakukan meliputi:

- 1) Tugas Menetapkan Dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Secara umum, kebijakan moneter sebagai salah satu kebijakan ekonomi mikro ditujukan untuk memengaruhi perkembangan kegiatan perekonomian ke arah sasaran akhir yang diharapkan ini adalah sasaran tunggal untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Yang mana Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter diantaranya:

- a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan
- b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik mata uang Rupiah maupun valas, penetapan

⁵ Veithzal Rivai, *dkk Op.,Cit.* hal. 38

tingkat *diskonto*, penetapan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit atau pembiayaan.

- c. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan.
- d. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan system nilai tukar yang telah ditetapkan.
- e. Mengelola cadangan devisa.
- f. Menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro.
- g. Bank Indonesia tidak lagi diperkenankan memberikan kredit kepada pemerintah dan kredit likuiditas dalam rangka kredit program.
- h. Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugasnya.

2) Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran yang lancar dan aman merupakan salah satu prasyarat dalam keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia berwenang:

- a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

- b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya.
- c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
- d. Mengatur sistem kliring antar bank baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing.
- e. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank.
- f. Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahwa yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.
- g. Mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnakan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama.

3) Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank

Tugas mengatur dan mengawasi bank merupakan salah satu yang penting khususnya dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat pada akhirnya dapat mendorong efektivitas kebijakan moneter. Dan Bank Indonesia berwenang untuk melakukan:

- a. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip-prinsip kehati-hatian.
- b. Memberikan dan mencabut izin usaha bank.
- c. Memberikan izin membuka, penutupan dan pemindahan kantor bank.

- d. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan pengelolaan bank.
- e. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.
- f. Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
- h. Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindakan pidana di bidang perbankan.
- i. Mengatur dan mengembangkan informasi antar bank.
- j. Mengambil tindakan terhadap suatu bank sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku apabila menurut penilaian Bank Indonesia dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan atau membahayakan perekonomian nasional.
- k. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang.

Selain tugas pokoknya dalam lembaga keuangan Bank Indonesia juga mempunyai tugas yaitu mendorong kelancaran produksi,

pembangunan dan kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat.⁶ Yang mana Bank Indonesia selaku pemegang kas pemerintah termasuk mengatur pemindahan uang dan surat-surat berharga pemerintah, mengatur lalu lintas devisa dan mewakili pemerintah dalam mengatur alat-alat pembayaran internasional dan mengatur posisi likuiditas dan solvabilitas negara di dunia internasional.

4. Struktur Organisasi Kantor Bank Indonesia Pekanbaru

Saat sekarang ini terdapat 37 kantor Bank Indonesia, yang mempunyai tugas dan wewenang yang sama yaitu dalam bidang perekonomian, sistem pembayaran dan juga dalam bidang perbankan. Setiap bagian mempunyai tugas-tugas masing-masing. Adapun tugas yang dilakukan oleh kantor Bank Indonesia Pekanbaru adalah:

1. Bidang sistem pembayaran meliputi pelaksanaan operasional sistem pembayaran (tunai dan non tunai) kepada perbankan, pemerintah dan pihak ketiga di wilayah kerja.
2. Bidang ekonomi dan moneter meliputi kebijakan ekonomi dan moneter yang telah ditetapkan kantor pusat, pengkajian ekonomi regional (KER), pengkajian efektifitas pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi moneter pusat untuk wilayah provinsi, menyediakan statistic ekonomi, keuangan dan perbankan, serta memberikan masukan kepada pemerintah daerah setempat dalam bidang pembangunan ekonomi.

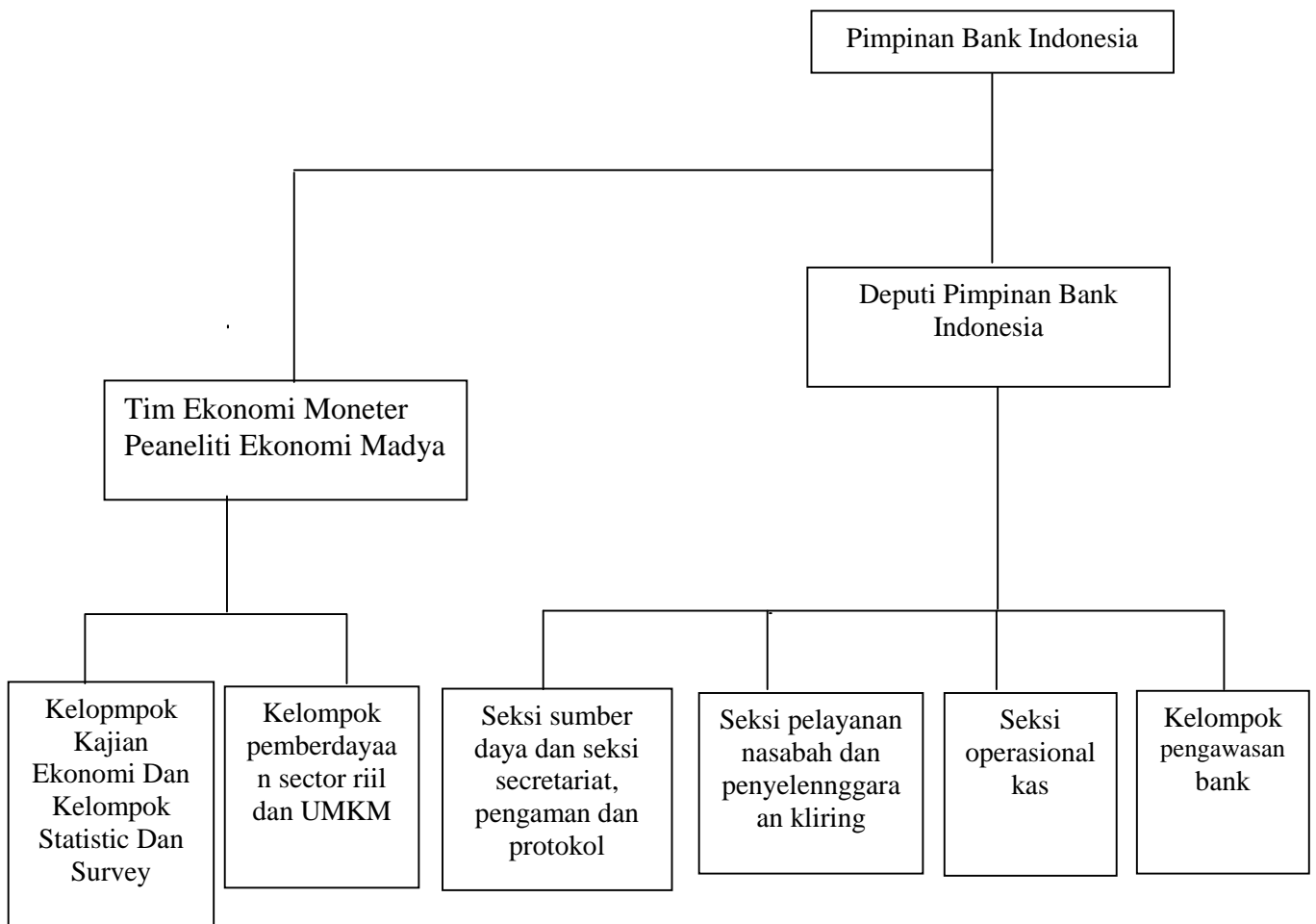
⁶. Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) Cet. 3, hal. 163

3. Bidang perbankan meliputi pelaksanaan dan pembinaan bank, perusahaan pembiayaan dan pedagang valuta asing yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor Bank Indonesia, serta berperan aktif menciptakan iklim perbankan yang sehat di wilayah kerjanya.
4. Bidang manajemen intern meliputi perencanaan operasional kegiatan kantor Bank Indonesia termasuk anggarannya dan mendukung kelancaran pelaksanaan bidang-bidang moneter perbankan, dan sistem pembayaran tersebut diatas.

Sebagai wakil bank di daerah, Kantor Bank Indonesia diwajibkan untuk membina hubungan baik dengan pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya, dan masyarakat setempat agar dapat memberi masukan dan sekaligus memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas Bank Indonesia yang dilaksanakan oleh satuan kerja di kantor pusat maupun di daerah.

Kantor Bank Indonesia Pekanbaru merupakan salah satu dari 37 kantor Bank Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. Pada saat ini Kantor Bank Indonesia telah berdiri selama 43 tahun. Dalam perjalannya yang relative panjang ini tentu ada pergantian, baik pemimpin KBI Pekanbaru maupun para pegawai KBI Pekanbaru. Adapun struktur organisasi KBI Pekanbaru dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

Gambar II. Struktur Organisasi Kantor Bank Indonesia Pekanbaru



Sumber : KBI Pekanbaru, 2007

5. Misi dan Visi Bank Indonesia

Adapun yang menjadi misi Bank Indonesia yang telah dirancang dalam *booklet* Perbankan Indonesia 2008 adalah “mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan kestabilan sistem keuangan untuk

pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan”.⁷ Dan Bank Indonesia, perumusan misi dimaksud diharapkan dapat membantu organisasi dalam:

1. Menetapkan dan menjaga konsistensi, serta kejelasan tujuan masyarakat.
2. Memberikan referensi untuk merencanakan dan proses pengambilan keputusan.
3. Memperoleh komitmen para anggota dewan gubernur dan seluruh pegawai, melalui komunikasi yang jelas tentang tugas organisasi.
4. Memperoleh dukungan dan pengertian dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan tugas organisasi.

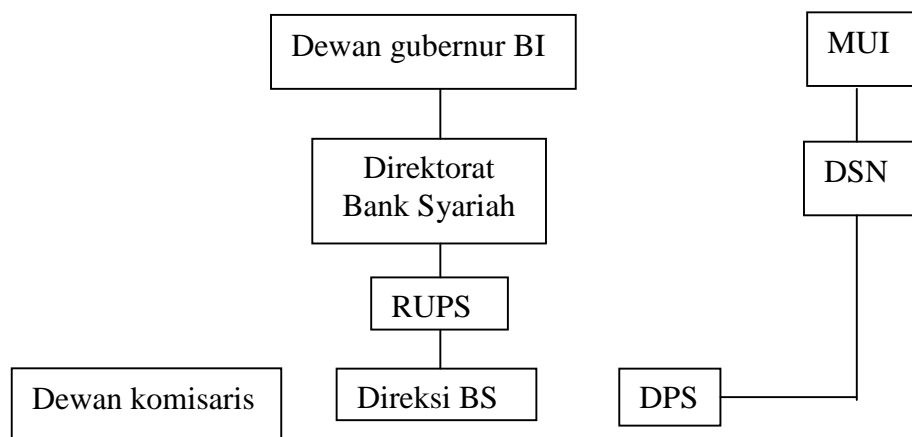
Visi Bank Indonesia adalah “menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil”. Terpercaya maksudnya adalah apabila ada pihak yang berkepentingan dengan Bank Indonesia mengakui bahwa setiap produk atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dapat dipercaya dan dijadikan acuan bagi lembaga. Dan visi tersebut untuk masa jangka waktu yang lama atau jangka panjang, meskipun tanpa mengurangi adanya peluang untuk melakukan penyesuaian dari waktu ke waktu dalam rangka mendukung pencapaian Misi Bank Indonesia.

⁷. Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia* (05 April 2008)

Visi Bank Indonesia merupakan konsep ideal yang diharapkan dimiliki oleh Bank Indonesia yang disadari pencapaiannya tidak dapat diwujudkan dalam waktu singkat, sehingga diperlukan arah strategis untuk mencapainya dan dilakukan secara bertahap serta berkesinambungan. Visi tersebut sangatlah penting bagi Bank Indonesia, karena dapat:

1. Memperjelas arah organisasi ke depan.
2. Memotivasi anggota dewan gubernur dan pegawai Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
3. Mengkoordinasikan tindakan serta kebijakan dari anggota dewan Gubernur dan pegawai secara lebih efisien dan efektif.
4. Memberikan keyakinan dalam pencapaian misi organisasi.

Gambar III. Hubungan Bank Indonesia, DSN, MUI, DPS dan Bank Syariah



Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan dapat meminta fatwa kepada DSN apabila disinyalir ada masalah pelanggaran *syariah compliance*. Sebaliknya, DSN juga dapat melakukan inisiatif atau berperan aktif dalam mengawasi DPS ataupun bank islam terdapat adanya permasalahan syariah

compliance, misalnya terdapat produk-produk, praktik bank islam , maupun tindakan DPS yang melanggar prinsip-prinsip syariah, dengan jalan melaporkan kepada BI. Dan BI melakukan tindakan-tindakan penerbitan atau pemberian sanksi kepada bank inslam atau praktik perbankan islam yang melanggar tersebut sesuai dengan peraturan BI yang berlaku. Begitu juga DSN juga dapat melakukan teguran langsung kepada DPS yang bersifat moral.

B. Profil PT. Bank Riau Kepri Syari'ah

1. Sejarah Berdirinya Bank Riau Kepri Syari'ah

Bank Riau Kepri Syari'ah tidak hanya dilandasi dengan adanya fakta haramnya bunga bank pada akhir tahun 2003 dari Majelis Ulama Indonesia. Tetapi juga disokong oleh beberapa faktor, salah satunya adalah memungkinkan diimplementasikan Bank Riau Kepri Syari'ah adalah dari sisi regulasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan dari Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah memberikan peluang bagi bank umum konvensional untuk ikut serta menangani transaksi perbankan syari'ah.

Pendirian Bank Riau Kepri Syari'ah diawali dengan melakukan restrukturisasi organisasi PT. Bank Riau Kepri dengan membentuk Unit Usaha Syari'ah (UUS) melalui Surat Keputusan Direksi BPD Riau No. 44/KEPDIR/2002 pada tanggal 01 Oktober 2002. Perstrukturisasi organisasi ini kala itu dilakukan juga untuk mengantisipasi perubahan sistem teknologi informasi PT. Bank Riau Kepri yang telah *online* serta

terjadinya perubahan badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi perusahaan terbatas.

Akselerasi pendirian Bank Riau Kepri Syari'ah dipercepat dengan pembentukan tim pembangunan unit usaha syari'ah Bank Riau dengan SK direksi PT. Bank Riau No. 39/KEPDIR/2003. Seiring dengan dibentukkannya tim tersebut maka unit usaha syari'ah sebagai koordinator pendirian Bank Riau Syari'ah untuk melakukan beberapa langkah akselerasi. pendirian Bank Riau Syari'ah bekerjasama dengan sebuah konsultan perbankan syari'ah yang mana untuk melakukan dalam hal rekrutmen sumber daya insani baik internal maupun eksternal, marketing research, training, simulasi serta penyusunan standar operasional dan prosedur. Dan sumber daya insani juga dibekali secara intensif dengan pelatihan, training,seminar perbankan syari'ah yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga.

Pengajuan pendirian Bank Riau Kepri Syari'ah kepada Bank Indonesia Pekanbaru diajukan pada tanggal 29 Januari 2004, dan persetujuan pendirian dari Bank Indonesia didapat tanggal 27 Februari 2004 melalui surat Bank Indonesia No. 6/7/Dpbs/pbr/KBI Pekanbaru. Sebelum izin prinsip diajukan Bank Riau Kepri Syari'ah kepada Bank Indonesia Bank Riau Kepri Syari'ah telah melakukan langkah dalam pendirian bank tersebut termasuk rehab gedung kantor cabang syari'ah dan UUS, persiapan aplikasi IT syari'ah dan lain-lain. Pengurusan izin

operasional diterima pada bulan Juni 2004 yang memungkinkan untuk mulai beroperasi Bank Riau Kepri Syari'ah.

Awal tahun 2008 Bank Riau Kepri Syari'ah telah memiliki 2 kantor cabang yaitu di Pekanbaru dan Tanjung Pinang namun pada akhir tahun Bank Riau Kepri Syari'ah telah membuka cabang baru di Tembilahan, Duri dan Batam serta satu kantor kas di kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Pekanbaru serta delapan Kedai Layanan Syari'ah (KLS). Serta layanan syari'ah yang tersebar di seluruh jaringan kantor atau cabang pembantu PT. Bank Riau Kepri di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau sebanyak 33 unit layanan syari'ah. Dan sekarang nama Bank Riau diganti dengan nama Bank Riau Kepri Syari'ah dengan Untuk lebih mengakomodir para pemegang saham dari Provinsi Kepulauan Riau, Bank Riau pun merubah namanya menjadi Bank Riau-Kepri. Hal itu dilakukan usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Riau di Hotel Harmoni One, Batam, Kamis (19/8/2010).

RUPSLB yang kemarin, digelar di Batam memutuskan untuk merubah nama Bank Riau menjadi Bank Riau-Kepri. Keputusan itu diambil untuk lebih mengakomodir keberadaan para pemegang saham dari Provinsi Kepri.⁸

Selain perubahan nama, selanjutnya, RUPSLB kali ini juga menunjuk Joni Irwan sebagai Komisaris Utama Bank Riau-Kepri menggantikan Mambang Mit. Selain itu juga memperpanjang masa tugas

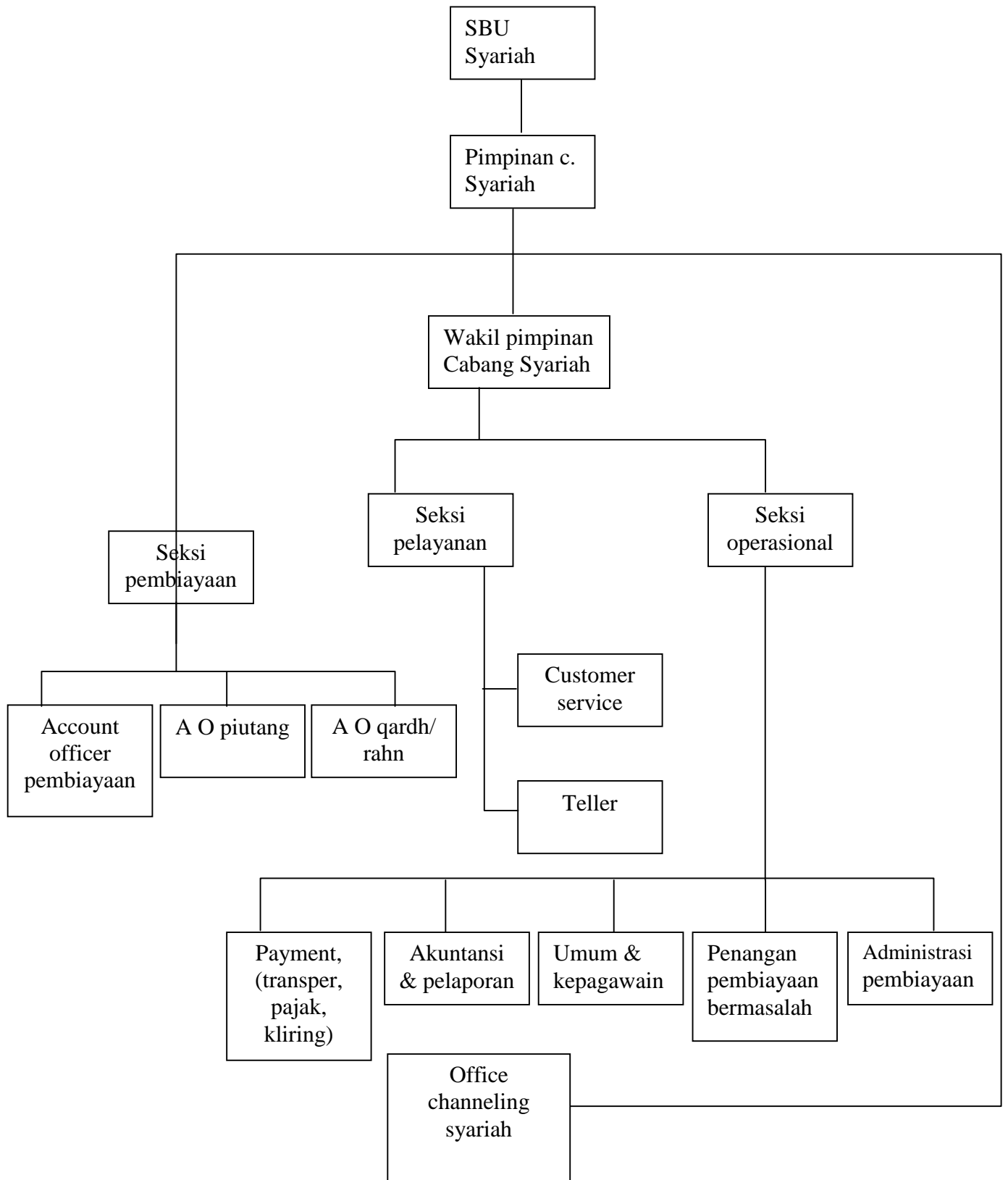
⁸ <http://riaubisnis.com>, Jumat (20/8/2010). Company Profile PT.Bank Riau Kepri Syariah

Khairisman Rasahan dan Riva'i Rahman sebagai komisaris yang awalnya akan berakhir pada Desember nanti.

2. Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Syari'ah

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka usaha dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan organisasi, dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas fungsi serta tanggung jawabnya, sistem *internal control* yang dijalankan oleh Bank Riau Kepri Syari'ah sebagai suatu organisasi dalam usaha serta kegiatannya, maka telah dirumuskan aturan-aturan pembagian tugas, dan wewenang dan tanggung jawab setiap personil maupun bagian-bagian yang secara bersama untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Untuk lebih jelas struktur organisasi yang terdapat dalam Bank Riau Kepri Syari'ah dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar V. Organisasi Kantor Bank Riau Kepri Syariah



BAB III

RUANG LINGKUP PENGAWASAN BANK INDONESIA

TERHADAP BANK SYARI'AH

Dalam undang-undang perbankan dinyatakan secara tegas, bahwa pembinaan dan pengawasan bank akan dilakukan oleh Bank Indonesia adapun tugas pokok Bank Indonesia adalah membuat aturan-aturan strategis dan teknis yang berupa norma-norma hukum yang diberlakukan terhadap *stakeholder* untuk mendukung perkembangan bank Islam. Adapun aspek yang diawasi oleh Bank Indonesia di antaranya.¹

A. Aspek-aspek pengawasan Bank Indonesia terhadap bank syari'ah

1. Aspek Administratif

Pengawasan administratif yang dilakukan oleh Bank Indonesia diantaranya adalah tentang perubahan kegiatan usaha dan pembukaan kantor cabang syari'ah dan pendirian bank yang berdasarkan prinsip syari'ah. Pengawasan dalam aspek administratif ini telah ditetapkan dalam undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 29 ayat (1) dan Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 bab III bagian kesatu tentang perizinan pasal 5 ayat 1 yang berbunyi: "setiap pihak yang melakukan usaha bank syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank syariah atau UU dari Bank Indonesia"

¹. Wirdaningsih, Karnaen Perwatatamadja, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2005) Ed.1. Cet 2 hal 88

Dan aspek administratif juga telah dirincikan dalam peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang unit usaha syari'ah. Bab II tentang perizinan bagian kesatu Pembukaan Unit Usaha Syari'ah Pasal 2 yang berbunyi :

- 1) Bank umum konvensional yang akan melakukan usaha berdasarkan prinsip syari'ah wajib membuka unit usaha syari'ah (UUS)
- 2) Rencana pembukaan UUS harus dicantumkan dalam rencana bisnis bank umum konvensional.

Pasal 3 yang berbunyi:

- 1) Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia
- 2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk izin usaha.

Pasal 4

- 1) Modal kerja UUS ditetapkan dan dipelihara paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah)
- 2) Modal kerja UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disisihkan dalam bentuk tunai.

Saat sekarang ini tidak sedikit bank konvensional yang mengubah kegiatan usahanya atau membuka kantor cabang syari'ah. Yaitu diantaranya PT Bank Tabungan Negara (persero), Tbk; PT Bank Permata, Tbk; PT Bank CIMB Niaga Tbk; dan PT Bank Riau Kepri,² Bank Central

² <http://www.mediaindonesia.com/berita.asp?id=155453> diakses 23 Januari 2008

Asia (BCA), Bank Sinar Mas.³ Kondisi seperti ini menunjukkan, bahwa keberadaan bank Islam sebagai bank yang menggunakan sistem baru yang dikenal di Indonesia semakin kokoh. Sistem syari'ah sudah dapat diterima bahkan menjadi suatu pilihan yang terbaik. Semua ini patut kita syukuri, namun Bank Indonesia seharusnya semakin cermat dalam mengawasi kegiatan bank konvensional yang membuka cabang syari'ah atau mengubah kegiatan usahanya menjadi bank Islam. Dikhawatirkan tujuan mereka hanyalah sekedar mencari keuntungan sesaat tanpa memahami secara penuh apa makna dari bank Islam itu sendiri.

Selain itu Bank Indonesia juga harus lebih memperhatikan sumber daya manusia yang bekerja di induk perusahaan yang konvensional dengan anak perusahaan yang syari'ah bila jabatan tertinggi mereka di anak perusahaan adalah kepala divisi, dan kesempatan mereka hanya sampai disitu saja. Dan apabila mereka ingin naik jenjang kareir, maka mereka kembali ke induk perusahaan yang masih konvensional. Dengan demikian tampak bahwa kesungguhan SDM dalam menjalankan kegiatan syari'ah Islam secara *kaffah*. Kemudian kemampuan mereka di bidang syari'ah akan tidak termamfaatkan bila kembali ke tempat asal. Hal ini sangat disayangkan. Oleh karena itu bank konvensional yang membuka cabang syari'ah di bawah koordinasi Unit Usaha Syari'ah (UUS) di kantor pusat, seharusnya membuka perencanaan kareir bagi SDM syari'ahnya. Jangan sampai terjadi mereka yang sudah mapan di UUS ditarik kembali yang

³ [www.kompas.com /kompas-cetak/0801/08/ekonomi/4147979.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0801/08/ekonomi/4147979.htm) diakses Januari 2008

masih. Sedangkan pengawasan Bank Indonesia belum sampai kesana. Sebenarnya hal yang demikian juga seharusnya diawasi oleh Bank Indonesia.

2. Aspek keuangan

Dalam aspek keuangan ini Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan batas maksimum pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang harus dipatuhi oleh bank Islam. bank Islam dalam hal ini berkewajiban menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan menyampaikan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, yang harus sesuai dengan undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pada pasal 29 dan juga telah dijelaskan dalam undang-undang RI No 21 Tahun 2008 pasal 11 yang berbunyi“ besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan bank syariah ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia”. Salah satunya PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang bank umum syariah, PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang unit usaha syariah, PBI No.10/16/PBI/2008 tentang kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta jasa bank syariah, I No. 11/24/PBI/1009 tentang pendanaan jangka pendek syariah bagi bank umum syariah. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan keuangan adalah dengan menggunakan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah (PSAK NO. 59 2002) yang sudah disempurnakan

dengan PSAK 101 yang juga mengatur tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan syariah untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*)⁴

Adapun akuntansi Islam berhubungan di antaranya, dengan pengakuan, perhitungan dan pencatatan transaksi dan persentase yang adil akan hak dan kewajiban. yang mana setiap kegiatan usaha bank Islam semuanya akan didasarkan landasan Al-Quran dan hadist seperti kegiatan usaha bank Islam yang berkaitan dengan sumber dana. Telah ditetapkan akuntansi sumber dana.

- a. Akad *wadiah* dalam penerimaan dana mengharuskan bank mencatat sebagai utang yang berarti bank harus mengembalikan kepada pemilik apa pun yang terjadi dan tidak terkait dengan hasil investasi.
- b. Akad *mudharabah* mengharuskan bank mencatat sebagai rekening investasi (bukan utang) sehingga bank tidak ada kewajiban untuk mengembalikan jika investasi tersebut rugi sampai memakan modalnya.
- c. Konsekuensi yang muncul untuk akad wadiah bank tidak memberikan imbalan apapun yang diperjanjikan di muka tetapi untuk akad mudharabah bank akan memberikan imbalan bagi hasil dari hasil investasi sesuai nisbah yang disepakati di muka antara bank dengan nasabah pemilik modal.

⁴ Muhammad, Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah* (yogyakarta: P3EI Press, 2008) Ed.1 hal.130

- d. Untuk modal dicatat sama dengan perusahaan pada umumnya dengan akad yang berlaku umum meskipun ahli syari'ah menganggap masuk dalam kategori akad syari'ah *al- innah*.

Sedangkan dalam kegiatan usaha menyalurkan dana bank syari'ah yaitu:

- a. Membeli barang untuk dijual kembali dengan akad murabahah (umumnya tidak tunai) dengan keuntungan berupa margin bagi bank dan dicatat sebagai piutang murabahah.
- b. Melakukan investasi dengan akad mudharabah atau musyarakah dengan prinsip bagi hasil.
- c. Melakukan investasi dalam bentuk aset yang akan disewaka (*ijarah*) dengan *option* untuk dimiliki oleh penyewa pada akhir masa kontrak sewa.
- d. Prinsip yang digunakan adalah *operating lease*.
- e. Melakukan pembelian aset dengan pembayaran di muka (akad salam atau istisna') untuk kemudian dijual kembali atau disewakan yang diakhiri dengan berpindah pemilikan (*istisna' wal ijarah*).

Dan ada pun komponen laba yang diterima bank syari'ah yaitu:

- a. Pendapatan margin dari transaksi murabahah.
- b. Pendapatan bagi hasil dari transaksi mudharabah dan musyarakah.
- c. Pendapatan sewa dari transaksi ijarah.
- d. Pendapatan jasa-jasa lainnya.
- e. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan yang berupa porsi bagi hasil yang diperoleh bank atas hasil investasi yang sumber dananya berasal dari investor (*shabinul mal*)
- f. Pada dasarnya bagi hasil yang diberikan kepada investor bukan merupakan komponen biaya/beban.
- g. Beban operasional sepenuhnya menjadi porsi bank bila bank menggunakan prinsip *revenue sharing* tetapi bila bank menggunakan prinsip *profit sharing* maka bagi hasil akan didasarkan pada net profit.

Selain kegiatan usaha yang telah ditetapkan harus pencatatan juga harus sesuai dengan akuntansi bank syari'ah, dan bank syari'ah itu sendiri juga telah memiliki *Accounting And Auditing Standar For Islamic Financial Institution* yang diterbitkan oleh *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution* yang berpusat di Manama Bahrain. Dan telah diadopsi oleh negara di mana terdapat bank Islam termasuk juga negara Indonesia.

Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia Menyusun Standar Akuntansi Bank Syari'ah telah menentukan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan syari'ah Islam sebagai berikut:

- a. *Hiwalah*: transaksi pengalihan piutang nasabah (muhil) kepada bank (muha'aalaih) dari nasabah lain (muhal).
- b. *Ijarah*: transaksi sewa menyewa barang antara bank (muajir) dengan penyewa (mustajir).⁵
- c. *Ijarah wal iqtina*: transaksi sewa menyewa barang antara bank (muajir) dengan penyewa (mustajir) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir.
- d. *Istishna'*: transaksi jual-beli barang (*mashnu'*) antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima barang (*shani*) (alur transaksi istishna' serupa dengan salam, hanya saja dalam istishna' bank dapat membayar harga pembelian dengan beberapa termin pembayaran).
- e. *Kafalah*: transaksi pemberian jaminan (*makful 'alaih*) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain ketika pemberian jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).
- f. *Mudharabah*: transaksi antara pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.
- g. *Mudhrabah mutlaqah*: transaksi mudharabah ketika mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal.

⁵Veitzal Rivai dkk, *Op., Cit* hal. 788

- h. *Mudhrabah muqayyadah*: transaksi mudhrabah ketika shahibul mal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi mudharib, baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.⁶
- i. *Murabahah*: transaksi jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank mendapatkan sejumlah keuntungan, dan keuntungan disebutkan kepada nasabah.
- j. *Musyarakah*: sebagai suatu perkongsian dua pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan tanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi.
- k. *Qardh*: transaksi pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sesuai dengan pinjaman.
- l. *Qardhul hasan*: transaksi pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sesuai pinjaman.
- m. *Rahn*: transaksi penyerahan barang atau harta (marhun) dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.
- n. *Salam*: transaksi jual beli barang pesanan (muslam fih) antara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam alaih) (di mana barangnya belum ada, sehingga barang yang menjadi objek transaksi tersebut diserahkan

⁶Ibid hal 789

secara tangguh dari hal ini bank menjadi pembeli dan nasabah menjadi penjual).

- o. *Sharf*: transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.
- p. *Uji*: imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.
- q. *Wadi'ah*: sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.⁷
- r. *Wadiah yad amanah*: transaksi penitipan barang atau uang kepada pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang bukan karena kelalaian penerima titipan.
- s. *Wadiah yad Dhamanah*: transaksi penitipan barang atau uang kepada pihak penerima titipan diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang bukan karena kelalaian penerima titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang menjadi hak penerima titipan.
- t. *Wakalah*: pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa.

⁷Ibid, hal 790

- u. *Al bai'al Takjiri*: sama dengan *Al-ijarah*, tetapi setelah selesai waktu sewa yang telah ditetapkan, maka pemilik barang menjual barang kepada penyewa, sesuai dengan perjanjian (atau sewa beli).⁸

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyetujui untuk menyebarluaskan *Exposure Draft* PSAK syari'ah pada tanggal 19 September 2006 yang terdiri:

- a. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syari'ah (KDPPLKS).
- b. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah.
- c. PSAK 102: Akuntansi Murabahah.
- d. PSAK 103: Akuntansi Salam.
- e. PSAK 104: Akuntansi Istishna.
- f. PSAK 105: Akuntansi Mudhrabah.
- g. PSAK 106: Akuntansi Musyarakah.

Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2008 Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) juga mengeluarkan 3 *Exposure Draft* PSAK Syari'ah yaitu :

- a. ED PSAK 107: akuntansi ijarah
- b. ED PSAK 108: akuntansi penyelesaian utang piutang murabahah
- c. ED PSAK 109: akuntansi zakat dan infak/sedekah.⁹

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baik PSAK Nomor 59 sampai dengan Nomor 106 tidak terlepas dari kerjasama tiga

⁸Ibid hal. 791

⁹ Rifqi muhammad, *Op.Cit*, hal 27

lembaga di tingkat nasional yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Bank Indonesia (BI) dan Dewan Syari'ah Nasional (DSN).

Bank Indonesia harus memberikan peraturan yang jelas dan ketat terhadap bank konvensional yang membuka cabang syari'ah. Misalnya dalam permodalan, jangan sampai terjadi percampuran modal antara bank konvensional dan bank Islam. Peluang ini bisa terjadi karena banyak bank Islam masih menggunakan fasilitas bank konvensional seperti ATM. *Online sistem.*

3. Aspek pengawasan syari'ah

Dari segi *syari'ah compliance*, sampai saat ini belum ada satu peraturan yang mengatur kewenangan dan tugas Bank Indonesia. Meskipun undang-undang perbankan secara umum mengatur norma maupun *code of conduct* bank, yang mungkin dapat dipahami sebagai implementasi prinsip syari'ah, yaitu antara lain kewajiban bank Islam untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah. Juga kewajiban bank Islam untuk mempunyai keyakinan dan melakukan analisis yang mendalam berdasarkan iktikad baik, kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor dalam hal pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah.

Ketentuan tersebut tidak memberikan arahan seberapa jauh Bank Indonesia dapat menilai dan bertindak dalam menentukan apakah produk jasa ataupun praktik bank Islam telah sesuai prinsip-prinsip syari'ah, dan sesuai dengan undang-undang No. RI 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 29 ayat (3) dan pasal 8, dan undang-undang No. 21 Tahun 2008 bab VIII pasal 53 ayat (2) yang berbunyi “ persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bank Indonesia”. Aspek ini juga diatur dalam peraturan Bank Indonesia No.13/3/PBI/2011 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasn bank, PBI No.9/19/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah, No.11/28/PBI/2009 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Tetapi Hingga saat ini kewenangan tersebut diberikan kepada Dewan Pengawas Syari'ah yang ada dalam bank-bank tersebut. Kewenangan dewan pengawas syari'ah berfungsi baik apabila Dewan Pengawas Syari'ah tetap mempertahankan Independensinya.

Kewenangan untuk melakukan syari'ah *complaine* dapat diserahkan kepada Dewan Syari'ah Nasional karena dalam hal ini DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syari'ah mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lambaga keuangan syari'ah di Indonesia.

Dalam hal ini bisa dikatakan Bank Indonesia tidak banyak mempunyai wewenang karena Bank Indonesia kurang menguasai tentang kegiatan perbankan syari'ah. Jadi dalam hal syari'ah *Complaine* Bank Indonesia menyerahkan kepada Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dan ditentukan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN).

B. Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia

Bank Indonesia seharusnya melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank dengan cara tersendiri yang sesuai dengan apa yang telah dirancang oleh Bank Indonesia tersebut yaitu:

1. Dengan cara langsung, yaitu para petugas Bank Indonesia dengan pemeriksaan setempat (*on site*). Pemeriksaan yang dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha bank (pemeriksaan umum) yang biasanya dilakukan setahun sekali, Yang menilai tentang sehat tidaknya suatu bank. Suatu bank dikatakan sehat, jika memenuhi syarat yaitu mampu mengembangkan usahanya dan memelihara kepercayaan masyarakat serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang perkreditan secara tepat dan efisien, kemudian pemeriksaan secara khusus yaitu, seandainya terjadi suatu kegiatan bank yang merugikan atau membahayakan kelangsungan usaha dan kepentingan umum ataupun yang bertentangan dengan bertentangan dengan kebijaksanaan moneter.¹⁰

¹⁰<http://google.regulasi+perbankan+di+indonesia.com>

2. Dengan cara tidak langsung, yaitu bank-bank diharuskan mengirimkan laporan neraca bulanan dan triwulanan untuk dianalisa lebih lanjut. Bank Indonesia juga berhak meminta laporan lain yang berhubungan dengan kegiatan bank.¹¹

Selain Bank Indonesia dapat langsung memeriksa kebank yang akan diawasi, Bank Indoensia juga wewenang dalam rangka pelaksanaan pengawasan diantaranya adalah:

1. Memeriksa dan mengambil data atau dokumen dari setiap tempat terkait dengan bank syari'ah dan unit usaha syari'ah.
2. Memeriksa dan mengambil data atau dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indoensia memiliki pengaruh terhadap bank syari'ah dan unit usaha syari'ah.
3. Memerintahkan bank syari'ah dan unit usaha syari'ah melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan.¹²

Bank Indonesia telah menetapkan bahwa setiap bank harus memberikan laporan-laporan yang terkait dengan manajemen risiko, dan laporan-laporan yang diperlukan yaitu:

1. Laporan profil risiko, bank harus menyerahkan laporan tentang profil risiko dan harus berisikan tentang informasi yang sama dengan yang

¹¹ O.P simorangkir *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, (Jakarta: Aksara Persada, 1989) ed rev, cet 7 hal. 153

¹²Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah (Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009) Ed 1 hal 40

dibuat oleh manajemen risiko (*chief risk officer*) dan harus disajikan setiap triwulan kepada Bank Indonesia dalam tujuh hari setiap akhir triwulan.

2. Laporan produk dan jasa baru, bank juga harus melaporkan produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan untuk nasabah, laporan produk dan jasa baru harus disajikan setiap triwulan juga, sama halnya dengan laporan profil risiko.
3. Laporan kerugian keuangan yang signifikan, baru harus mencatat kerugian keuangan yang signifikan dan harus melapor secepatnya kepada Bank Indonesia.
4. Laporan publikasi dan akuntansi, laporan ini berkaitan dengan transparansi bank harus memublikasikan informasi yang cukup untuk mencakup strategi dan kebijakan manajemen risiko yang akan diambil, karena laporan tersebut akan menambah terhadap informasi mengenai kondisi keuangan bank yang bersangkutan. Dan semua laporan yang akan dipublikasikan harus disetujui oleh Bank Indonesia.¹³

C. Metode Pengawasan Bank

1. Sistem pengawasan bank yang efektif sekurang-kurangnya mencakup atau merupakan kombinasi dari bentuk *on-site examination* dan *off-site supervision*.

¹³ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) Ed 1 hal. 64-65

2. Pengawasan bank harus melakukan kontak secara teratur dengan manajemen bank dan memiliki pemahaman yang seksama terhadap kegiatan bank yang diawasi.
3. Kegiatan pengawas bank sekurang-kurangnya perlu mencakup tahap-tahap pengumpulan data, pengkajian, dan analisis terhadap laporan-laporan bank (*prudential*), baik secara individual, maupun konsolidasi.
4. Pengawas bank harus melakukan kegiatan pembuktian secara independen terhadap kebenaran informasi pengawasan, baik melalui *on-site examination* maupun menggunakan jasa *auditor eksternal*.
5. Salah satu aspek yang mendasar dari pengawasan adalah kemampuan pengawasan bank untuk mengawasi grup perbankan secara konsolidasi.¹⁴

¹⁴ H. Masyhud Ali, *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006) Ed 1 hal. 472

D. Tujuan Pengawasan Bank Indonesia

Bank Indonesia mempunyai tujuan dalam melaksanakan pengawasan terhadap bank yaitu agar:

1. Marupakan sarana dalam melaksanakan kebijaksanaan moneter. Bank-bank tidak boleh menyimpang dari garis kebijaksanaan moneter yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Merupakan sarana dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini bank harus mengarahka operasi kreditnya sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah, contohnya rencana pembangunan lima tahun berorientasi kepada pertanian. Jadi, dana-dana tersebut diutamakan untuk pertanian.
3. Berkembang atas asas-asas perbankan yang sehat. Perbankan yang sehat merupakan suatu keharusan, sebab perbankan selaku lembaga keuangan yang menyalukan keuangan dalam proses ekonomi harus sehat.
4. Dapat melindungi kreditur bank. Bank harus dapat melunasi utangnya yang segera dapat ditarik ataupun untuk melunasi kewajiban yang lainnya. Dengan seperti itu bank akan mendapatkan kepercayaan dari nasabah.¹⁵

E. Fungsi Pengawasan Dalam Islam

Pengawasan merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan. Yang mana untuk

¹⁵ Simorangkir, *Op.,Cit*, hal 152

memastikan aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Fungsi utama dalam islam adalah memastikan bahwa setiap pegawai yang memiliki tanggung jawab harus dilaksanakan sebaik mungkin, hal tersebut muncul dari pemahaman tanggung jawab individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya jabatan (pekerjaan) merupakan amanah yang harus dijalankan. firman Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa' ayat: 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا﴾

Artinya: ”*sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat*”.¹⁶

Pengawasan internal ini melekat pada setiap pribadi muslim yang akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan. Dan pengawasan juga

¹⁶Mushaf Ar Rusydi, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Jakarta : Cahaya Quran , 2006) hal.

merupakan tanggung jawab sosial dan politik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal atau non formal.¹⁷

Yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar^[217]; merekalah orang-orang yang beruntung.”

¹⁷ Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006) Ed.1.
Hal. 179

BAB IV

PENGAWASAN BANK INDONESIA PEKANBARU TERHADAP PT.

BANK RIAU KEPRI SYARI'AH

A. Kegiatan Usaha PT Bank Riau Kepri Syari'ah

Bank Riau Kepri Syari'ah mempunyai tujuan yaitu membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dalam pembangunan daerah disegala bidang, juga sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Adapun tugas dan usaha Bank Riau Kepri Syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
2. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
3. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.¹

Bank Riau Kepri Syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, serta tata cara beroperasinya mengacu kepada

¹ M. Amin Wawancara (18 April 2011)

ketentuan-ketentuan Al-Quran dan As-sunnah. Bank Riau Kepri Syari'ah juga mempunyai Prinsip utama operasi yaitu:

1. Dioperasikan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah (syari'ah Islam)
2. Melakukan transaksi yang halal, tidak ada unsur maghrib yaitu maysir, gharar dan riba.
3. Tidak merugikan orang lain.
4. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa menyewa dan
5. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan (*partnership*)
6. Menyalurkan zakat.
7. Adanya tanggung jawab sosial dan keagamaan.
8. Penghimpunan dan penyalur dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syari'ah.

Persyaratan beroperasinya Bank Riau Kepri Syari'ah adalah dimilikinya produk syari'ah yang berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan disahkan oleh dewan pengawas syari'ah serta disetujui Bank Indonesia. Kegiatan usaha Bank Riau Kepri Syari'ah sama halnya dengan kegiatan-kegiatan usaha yang ada di bank-bank umum syari'ah yaitu diantaranya: menghimpun dana, menyalurkan dana dan jasa jasa unggulan lainnya. Pengertian penghimpunan dana adalah merupakan jasa utama yang ditawarkan dunia perbankan. Dana yang dihimpun dari masyarakat ini merupakan kegiatan tulang punggung (*basic*) dari dana yang

dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.² Sedangkan penyaluran dana (pembiayaan) adalah penyediaan dana atau tagihan piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut. Dan dari jasa-jasa yang lain yaitu seperti menyediakan bantuan-bantuan kepada pemerintah daerah atau masyarakat.

Adapun produk PT. Bank Riau Kepri Syariah dari penghimpunan dana adalah:

1. Tabungan iB sinar adalah simpanan dana yang menggunakan akad mudharabah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang telah ditentukan atau yang telah disepakati. Tetapi tabungan iB ini tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Deposito iB adalah simpanan dana berjangka dengan menggunakan akad mudharabah, yang penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
3. Tabungan iB dhuha adalah simpanan dana untuk keperluan menunaikan ibadah haji ke Mekkah dengan menggunakan akad wadia'ah tidak dapat ditarik sewaktu-waktu baik dengan cek maupun bilyet giro (BG), surat perintah pembayaran lainya atau dengan cara pemindahan bukuan.

². Rachmad Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2009) Hal.137

4. Giro iB adalah simpanan dari pihak ketiga pada bank yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek atau bilyet Giro (BG), surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahan bukuan.

Selain kegiatan menghimpun dana Bank Riau Kepri Syari'ah juga menyalurkan dana seperti bank-bank umum lainnya. Adapun produk dari penyaluran dana atau Produk pembiayaan adalah:

Pembiayaan modal kerja atas dasar kontrak

1. Pembiayaan iB karya prima adalah pembiayaan yang diberikan untuk membantu rekan mendapatkan tambahan modal kerja dalam rangka pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak dari instansi pemerintah atau instansi lainnya.

Pembiayaan Modal kerja umum:

1. Pembiayaan iB niaga prima adalah pembiayaan yang diberikan untuk membantu badan usaha untuk memenuhi kebutuhan terhadap aktiva tetap, aktiva lancar dan barang bergerak.
2. Pembiayaan iB aneka guna adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai dan pensiun yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi dan pengusaha dalam pembiayaan tanah untuk perumahan, pembangunan, rehabilitas, renovasi, rumah sendiri, pembelian perabot dan peralatan rumah tangga serta kebutuhan lainnya sesuai dengan prinsip syari'ah (murabahah dan ijarah).
3. Pembiayaan pemilikan kendaraan bermotorPembiayaan iB kendaraan bermotor murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai

berpenghasilan tetap, pensiunan, pekerja profesi dan pengusaha dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.

4. Pembiayaan pemilikan rumah pembiayaan iB pemilikan rumah murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi dan pengusaha untuk memilik tanah dan bangunan diatasnya termasuk rumah susun, ruko, kios apartemen, villa, kapling siap bangun.
5. Pembiayaan pengusaha kecil pembiayaan iB pengusaha kecil murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha kecil baik perorangan maupun kelompok untuk pembiayaan modal kerja atau investasi dengan prinsip murabahah. Usaha-usaha yang dibiayai adalah semua sektor ekonomi yang produktif terkecuali sektor-sektor ekonomi yang dilarang berdasarkan ketentuan Bank Indonesia atau sektor-sektor ekonomi yang dianggap telah jenuh.³

Adapun jasa-jasa lainnya atau Produk unggulan lainnya, Bank Riau Kepri Syariah mempunyai unggulan diantaranya: Gadai Emas iB adalah produk dimana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa barang atau harta dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank, dan atas pemeliharaan tersebut bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip ijarah.

³ Produk Bank Riau Kepri Syariah Cabang Utama Pekanbaru

Selain melakukan kegiatan usaha-usaha diatas Bank Riau Syari'ah juga melakukan kegiatan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat yaitu diantaranya:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip sharf.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip musyarakah dan mudharabah pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.
3. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syari'ah sesuai dengan peraturan dalam perundang-undangan dan pensiun yang berlaku.
4. Bank dapat bertindak sebagai lambaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada yang berhak dalam santunan atau pinjaman kebijakan (*qardul hasan*)

Bank Riau Kepri Syari'ah merupakan alat kelengkapan otonomi daerah, bank mempunyai tugas yaitu:

1. Sebagai penggerak dan pendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah
2. Sebagai pemegang kas daerah yang berdasarkan prinsip bagi hasil dan melaksanakan penyimpanan uang daerah.
3. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

B. Pelaksanaan Pengawasan Bank Indonesia terhadap PT. Bank Riau Kepri Syari'ah

Bank Indonesia Pekanbaru sebagai bank central bagi bank-bank yang ada di Provinsi Riau dan juga merupakan induk dari lembaga-kembaga keuangan yang lain. Bank Indonesia yang mempunyai tiga tugas atau wewenang yaitu mengatur sistem pembayaran, menjaga sistem moneter dan mengawasi perbankan, baik bank konvensional maupun bank syari'ah. tetapi perlu ditekankan yang diawasi oleh Bank Indonesia Pekanbaru adalah bank yang kantor induknya ada di Provinsi Riau salah satunya Bank Riau Kepri Syari'ah.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap perbankan syari'ah, Bank Indonesia hanya mempunyai tiga aspek yaitu aspek administratif, keuangan dan syariah *complik* dari tiga aspek tersebut dalam aspek administratif Bank Indonesia meninjau terhadap objek yaitu dengan cara memantau daerah yang akan didirikan kantor bank syari'ah itu, atau langsung mengontrol letak geografisnya karena dalam aspek administratif bank tidak dapat hanya mengawasi tentang dokumen saja tetapi harus dalam bentuk riil (nyata). Dan prosedur pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia yaitu ada 2 bentuk yaitu:

1. *On site* yaitu mengawasi bank dengan cara langsung yaitu mendatangi dan memeriksa bank baik secara umum maupun secara khusus. Bagian pengawasan Bank Indonesia akan datang ke bank yang akan diawasi yaitu Bank Riau Kepri Syari'ah. Bank Indonesia akan memeriksa secara umum

dari bagian laporan yang telah dibuat oleh Bank Riau Kepri Syari'ah. Yaitu dari laporan keuangan yang menyangkut tentang Penempatan dana Pada Bank Lain adalah penanaman dana pada Bank Umum Syari'ah, Unit Usaha Syari'ah atau BPRS lainnya berdasarkan Prinsip Syari'ah antara lain dalam bentuk giro, tabungan, dan/atau deposito, Pembiayaan, dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya sesuai dengan Prinsip Syari'ah.⁴ batas maksimum pembiayaan yaitu pembiayaan yang diberikan Bank Riau Kepri Syari'ah kepada nasabah tidak boleh melebihi dari standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. pengawasan ini dilakukan dalam satu kali setahun dan menurut penelitian penulis Bank Indonesia akan menghubungi Bank Riau terlebih ketika akan melakukan pengawasan *on site*.⁵

2. *Off site* Dengan cara tidak langsung yaitu Bank Indonesia hanya meminta Bank Riau Kepri Syariaah untuk mengirim laporan keuangannya dengan cara *on-line* setiap bulan atau setiap triwulan adapun laporan yang akan diterima oleh Bank Indonesia diantaranya Laporan profil risiko, yaitu tentang resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Laporan produk dan jasa baru, Bank Riau Kepri Syari'ah juga harus melaporkan produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan untuk nasabah, laporan produk dan jasa baru harus disajikan setiap triwulan juga, sama halnya dengan laporan profil risiko. Laporan kerugian keuangan yang signifikan,

⁴ Peraturan Bank Indonesia. No 13/14/Pbi/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

⁵ Ajeng Bagian Pengawasan Bank Indonesia (Wawancara, Pekanbaru, 20 Mei 2011)

baru harus mencatat kerugian keuangan yang signifikan dan harus melapor secepatnya kepada Bank Indonesia. Laporan publikasi dan akuntansi, laporan ini berkaitan dengan transparansi Bank Riau Kepri Syari'ah harus memublikasikan informasi yang cukup untuk mencakup strategi dan kebijakan manajemen risiko yang akan diambil, karena laporan tersebut akan menambah terhadap informasi mengenai kondisi keuangan bank yang bersangkutan. Dan semua laporan yang akan dipublikasikan harus disetujui oleh Bank Indonesia.

Sejak berdirinya Bank Riau Kepri Syariah Bank Indonesia baru 2 kali melakukan secara langsung. Sedangkan laporan bulanan bank umum syariah (LBBUS) setiap bulan sudah dikirim ke Kantor Bank Indonesia Pekanbaru. Dan yang dikirim oleh bank riau kepri syariah yaitu tentang neraca bulanan, laporan laba rugi dan lain sebagainya.⁶

C. Analisis Tentang Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Kegiatan Usaha PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Menurut Teori Pengawasan Bank

Sejauh penelitian yang penulis lakukan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia semua hampir sama dengan teori pengawasan bank syari'ah. Yaitu melakukan pengawasan dengan 2 cara *on site* dan *off site*. Dan karena Bank Indonesia selaku bank sentral bagi bank-bank yang ada di Riau mempunyai tugas dan wewenang yang mampu menstabilkan Rupiah dengan

⁶ Anthon indra jaya, *Bagian Operasional Bank Riau Kepri Syariah* (wawancara: 30 Juni 2011)

cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan moneter dan juga mengawasi jalannya kegiatan usaha bank yang ada di daerah Riau.

Bank Indonesia Pekanbaru melakukan pengawasan sudah dapat dikatakan efektif, disebabkan terjangkaunya bank yang diawasi oleh Bank Indonesia.⁷ Yang mana Bank Indonesia melakukan pengawasan dengan acuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/pbi/2009 Tentang Unit Usaha Syariah yaitu pada pasal 3 yang menjelaskan bahwa pembukaan unit usaha syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia, Yaitu sesuai dengan aspek administratif bank syariah. Dan pengawasan selanjutnya tentang tingkat kesehatan bank yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/pbi/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah yang menjelaskan tentang penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

- a. permodalan (*capital*);
- b. kualitas aset (*asset quality*);
- c. manajemen (*management*);
- d. rentabilitas (*earning*);
- e. likuiditas (*liquidity*); dan
- f. sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*).

Yang mana dirangkum menjadi kalimat *camels*. Bank akan dikatakan apabila *camels*-nya juga sehat kemudian

Kemudian pengawasan tentang kegiatan usaha Bank Riau Kepri Syariah yang disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:

⁷ Muhammad Amin, *Bagian Operasional Bank Riau Kepri Syariah* (Pekanbaru, 18 April 2011)

9/19/pbi/2007 tentang pelaksanaan prinsip syari'ah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syari'ah yang menjelaskan tentang kegiatan usaha bank dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain Akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah* dalam kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain Akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiyah Bitamlik*. Dan *Qardh*; dan dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad *Kafalah*, *Hawalah* dan *Sharf*, sama halnya dengan ketentuan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh dewan syari'ah nasional.

Kemudian peraturan Bank Indonesia nomor: 10/17/pbi/2008 tentang produk bank syari'ah dan unit usaha syari'ah yang berisikan tentang dari mulai pertama bank akan berencana mengeluarkan produk baru sampai penghentian produk kemudian selain bank melapor kepada Bank Indonesia bank tersebut juga harus menyerahkan dokumen kepada Dewan Syari'ah Nasional dan pendapat dari Dewan Pengawas Syari'ah.

Dan peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/3/pbi/2011 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank yang menjelaskan tentang bank dalam pengawasan intensif dan bank dalam pengawasan khusus dari kedua kriteria bank dalam pengawasan tersebut Bank Indonesia Pekanbaru akan melakukan pengawasan intensif terhadap bank apabila dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, dan melakukan pengawasan khusus terhadap bank yang dinilai dalam keadaan mengkhawatirkan.

Bank Indonesia Pekanbaru sudah melaksanakan prosedur pengawasan sesuai dengan pengawasan bank pada umumnya dan juga sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia sudah efektif dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Riau Kepri Syariah, tetapi masih ada beberapa hal yang masih kurang yaitu baru sekitar 2 kali Bank Indoensia melakukan pengawasan dengan alasan bahwa Bank Riau Kepri Syariah saat sekarang ini hanya dalam pengawasan normal dan tidak terlalu penting dalam pengawasan langsung kerana sudah dilakukan pengawasan tidak langsung.⁸ dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pengawasan Bank Indoensia masih sudah efektif di karenakan kedua lembaga tersebut (Bank Indoensia dan Bank Riau Kepri Syariah) sama-sama kas daerah Riau dan juga yang menggerakkan perekonomian daerah Riau, dan kedua lembaga tersebut mempunyai kepentingan bersama yaitu untuk menjaga perekonomian Riau.

⁸ Farid, bagian pengawasan, KBI Pekanbaru (wawancara, 11 Mei 2011)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ruang Lingkup Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Bank Syaria'ah.
 - a. Aspek administratif yaitu tentang pendirian atau pembukaan kantor baru, yang mana setiap bank umum konvensional unit usaha syariah harus meminta izin kepada Bank Indonesia sebelum mendirikan kantor baru.
 - b. Aspek keuangan yaitu setiap bank harus memberikan laporan keuangan kepada Bank Indonesia yang tercantum tentang laporan neraca, laba rugi, kerugian keuangan, dan profil resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang.
 - c. Aspek syariah compliance yaitu tentang ketidaksesuaiannya prinsip atau masalah syariah yang mana hal tersebut Bank Indonesia telah menyerahkan aspek ini kepada Dewan Pengawas Syariah dan dilanjutkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Sedangkan prosedur atau mekanisme pelaksanaan pengawasan Bank Indonesia ada dua bentuk yaitu:

 - a. Dengan cara langsung, yaitu para petugas Bank Indonesia dengan pemeriksaan setempat (*on site*). Pemeriksaan yang dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha bank (pemeriksaan umum) yang biasanya dilakukan setahun sekali, yang menilai tentang sehat tidaknya suatu

bank. Suatu bank dikatakan sehat, jika memenuhi syarat yaitu mampu mengembangkan usahanya dan memelihara kepercayaan masyarakat serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang perkreditan secara tepat dan efisien, kemudian pemeriksaan secara khusus yaitu, seandainya terjadi suatu kegiatan bank yang merugikan atau membahayakan kelangsungan usaha dan kepentingan umum ataupun yang bertentangan dengan kebijaksanaan moneter.

- b. Dengan cara tidak langsung (*off site*) yaitu bank-bank diharuskan mengirimkan laporan neraca bulanan dan triwulanan untuk dianalisa Bank Indonesia apakah bank tersebut sehat, BI juga berhak meminta laporan lain yang berhubungan dengan kegiatan bank.

2. Kegiatan Usaha Dalam Bentuk Menghimpun Dana dan penyaluran dana,
Yaitu:

- a. Tabungan iB Sinar
- b. Tabungan iB Sinar Mahasiswa
- c. Tabungan iB Dhuha)
- d. Giro iB
- e. Deposito iB

Produk pembiayaan

- a. Pembiayaan iB Aneka Guna
- b. Pembiayaan iB Kendaraan Bermotor
- c. Pembiayaan iB Pemilikan Rumah
- d. Pembiayaan iB Komersil

e. Pembiayaan iB Usaha Mikro & Kecil

f. Gadai Emas iB

Jasa Perbankan yang lain

a. Bank Garansis

b. Referensi Bank

c. Transfer, Kiriman Uang

3. Pelaksanaan Pengawasan Bank Indonesia Pekanbaru Terhadap PT. Bank Riau Kepri Syariah

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Pekanbaru dapat dikatakan sudah efektif karena sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan Bank Indonesia tentang pengawasan Bank Indonesia terhadap bank syariah.

Bank Indonesia juga kurang ikut campur dalam jalannya kegiatan Bank Riau Kepri Syariah karena adanya dewan pengawas syariah pada bank tersebut. Kegiatan usaha Bank Riau Kepri Syariah lebih diawasi oleh dewan pengawas syariah pada Bank Riau Kepri Syariah tersebut.

Bank riau kepri syariah juga dinyatakan oleh Bank Indonesia dalam keadaan sehat yang mana hanya dilakukan pengawasan normal yaitu pelaksanaan pengawasan langsung yang minimal sekali setahun. dengan beratnya tugas Bank Indonesia Pekanbaru saat ini menyebabkan kurang lancarnya pelaksanaan pengawasan secara langsung.

B. Saran

Seharusnya pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia harus cukup terbuka dan memberikan informasi akurat serta auditing yang memadai. Untuk itu Bank Indonesia selaku bank sentral bagi bank-bank yang ada di Riau harus memainkan peranan penting dalam menentukan persyaratan. Dan Bank Indonesia juga harus ikut memperkuat kontrol internal dan memberikan petunjuk-petunjuk kebijaksanaan, dan memantau kualitas aset maupun kegiatan perbankan. Untuk menjamin kewibawaan dan kejujuran bank sentral harus memperbaiki konsep-konsep dan prosedur auditing.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Buchari, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: CV Alfabeta, 2003)
- Ali, Masyhud, *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Ali, Taman, Mokh HB. Syaiful Bakhir dkk, *Ekonomi Syari'ah dalam Sorotan* (Jakarta: Yayasan Amanah , 2003)
- Antonio, Syafi'i M, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Bank Indonesia *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Riau* (9 Februari 2011).
- Bank Indonesia, Booklet Perbankan Indonesia (05 April 2008)
- Departement Agama RI 1978, *Al-Qur'an dan Terjamahannya*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Gamal, Mezra, *Aktivis Ekonomi Syari'ah Catatan Dakwah Seorang Praktisi Perbankan Syari'ah*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004)
- Hamidi, M. Luthfi, *Jejak-jejak Ekonomi Islam* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003)
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996)
- Hasan, Ali M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2004)
- Hilman, Iman. *Perbankan Syariah Masa Depan*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003)
- <http://.goagle.regulasi+perbankan+di+indonesia.com>
- <http://www.mediaindonesia.com/berita.asp/id=155453> diakses 23 januari 2008
- Ibrahim,Ahmad. *Manajemen Syariah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Salemba Empat, 2002)

- Manurung, *Mandala Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter (Kajian Konstektual Indonesia)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004)
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Muhammad,Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2008) Ed.1 hal.130
- Mushaf Ar Rusydi, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakrta : Cahaya Quran , 2006)
- O.P Simorangkir, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, (Jakarta: Aksara Persada, 1989)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Negeri Yogyakarta (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Rachmad Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2009)
- Rivai, Veithzal, dkk *Bank and Financial Institution Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait* (BMUI dan Takaful) (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.1990)
- Usman Rianse dan Abdi, *metodologi penelitian sosial dan Ekonomi* (Bandung, CV Alfabeta, 2009) Cet ke 2, hal. 208
- Wijaya, Krisna. *Analisis Krisis Perbankan Nasional*, (Jakarta: Kompas, 2000)
- Wirdaningsih, Karnaen Perwatatamadja, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005)
- www.kompas. Com / kompas- cetak/ 0801/ 08/ ekonomi/ 4147979. htm diakses Januari 2008
- Yaya, Rizal. dkk *Akuntansi Perbankan Syariah. Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta : Selemba Empat,2009)
- Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah (Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009) Ed 1 hal 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar I	: Struktur Bank Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.....	18
Gambar II	: Struktur Organisasi Kantor Bank Indonesia Pekanbaru	26
Gambar III	: Hubungan Bank Indonesia, DSN, MUI, DPS dan Bank Syariah	28
Gambar IV	: Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Syariah.....	33
Gambar V	: Organisasi Kantor Bank riau Kepri syari'ah.....	34

PANDUAN WAWANCARA
UNTUK BANK INDONESIA PEKANBARU

1. Bagaimana pengawasan Bank Indonesia terhadap Bank Riau Kepri Syariah?
2. Apa saja kebijakan atau peraturan yang telah dikeluarkan oleh bank indonesia dalam pelaksanaan pengawasan?
3. Bagaimana koordinasi Bank Indonesia dengan dewan pengawas Syari'ah?
4. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengawasan Bank Indonesia terhadap kegiatan usaha Bank Riau Kepri Syariah?
5. Berapa jumlah kantor Bank Syari'ah di Pekanbaru yang diawasi oleh bank Indonesia?
6. Aspek apa saja yang diawasi oleh Bank Indonesia terhadap kegiatan usaha Bank Riau Kepri Syariah?
7. Bagaimana tanggapan Bank Indonesia tentang berita-berita tentang perbankan di Indonesia saat ini?
8. Bagaimana kegiatan usaha Bank Riau Kepri Syariah menurut penilaian Bank Indonesia
9. Apa perbedaan antara pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dewan pengawas syariah dan dewan syariah nasional?
10. Berapa orang bagian pengawasan di Kantor Bank Indonesia Pekanbaru serta nama-namanya?
11. Masalah apa yang dihadapi oleh BI dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Bank Riau Kepri Syariah?

PANDUAN WAWANCARA UNTUK

BANK RIAU KEPRI SYARIAH

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Pekanbaru terhadap Bank Riau Kepri Syariah?
2. Aspek apa saja yang diawasi oleh BI?
3. Bagaimana pengawasan yang bersifat aktif dan bersifat pasif. jelaskan?
4. Bagaimana pengaruh pengawasan BI terhadap eksistensi Bank Riau Kepri Syariah?
5. Bagaimana pengawasan BI sejak berita-berita tentang perbankan diIndonesia, apakah semakin ketat apakah seperti biasa saja?
6. Apakah pengawasan yang dilakukan BI sudah sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan BI sendiri?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Elisa
Tempat/Tgl Lahir : Titi Payung 26 oktober 1988
Alamat : Jl Subrantas Perum Paradise Blok G 6
Rimbo Panjang
Anak pertama dari pasangan Bpk Mistam dengan Ibu Miyatun

PENDIDIKAN

Tamatan SD Karya Bakti kec Bangko kab. Rokan Hilir	Tahun 1994-2000
Tamatan MTs Al-Furqon kec bangko kab. Rokan Hilir	tahun 2000-2003
Tamatan MA pon-pes Al-Jauhar kec Mandau kab. Bengkalis	Tahun 2003-2006
Tamatan S1 UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau	Tahun 2007-2011